

Transformasi Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan RAB: Studi Kasus di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango.

Ervan Hasan Harun^{*1}, Arfan Utiarahman², Jumiati Ilham³

^{1,3}Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Sekolah Vokasi, Universitas Negeri Gorontalo

²Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: ervanharun@ung.ac.id*, Arfanutiarahman@ung.ac.id, jumiatiilham@ung.ac.id

Article history

Received: 10-10-2025

Accepted: 23-10-2025

Published: 30-10-2025

Abstrak

Pembangunan infrastruktur desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akurat dan sesuai dengan standar harga satuan resmi seperti AHSP dan SNI. Di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, penyusunan RAB selama ini masih dilakukan secara manual tanpa acuan standar dan tanpa dukungan teknologi informasi, sehingga menghambat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengabdian dari Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan program pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Metode kegiatan meliputi pelatihan teknis penyusunan RAB berbasis AHSP/SNI, pelatihan penggunaan Excel, serta pengarsipan dokumen digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 35% dibandingkan sebelum pelatihan dan terbentuknya sistem pengarsipan digital di pemerintah desa. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis aparatur, memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, serta menjadi model replikasi bagi desa lain menuju transformasi digital pemerintahan desa.

Kata kunci: RAB; AHSP; digitalisasi; pelatihan; tata kelola desa

Abstract

Village infrastructure development plays a crucial role in improving welfare and equitable development. However, its success depends heavily on the ability of village officials to prepare accurate Budget Plan (RAB) documents that comply with official unit price standards such as AHSP and SNI. In Tuloa Village, North Bulango District, Bone Bolango Regency, RAB preparation has been carried out manually without standard references and without the support of information technology, thus hampering the efficiency, accountability, and transparency of Village Fund management. To address this, a community service team from Gorontalo State University implemented a training and mentoring program to increase the capacity of village officials through a participatory and collaborative approach. The activity methods included technical training in preparing AHSP/SNI-based RABs, training in Excel usage, and digital document archiving. Evaluation results showed a 35% increase in participant knowledge compared to before the training and the establishment of a digital archiving system within the village government. This program was deemed effective in improving the technical skills of officials, strengthening transparent village financial governance, and serving as a model for replication for other villages towards digital transformation of village government.

Keywords: RAB; AHSP; digitalization; training; village governance

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur desa merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, efektivitas pembangunan tersebut sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam menyusun dan mengelola dokumen perencanaan

yang akurat dan sesuai standar, terutama Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek, sekaligus menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik di desa.

Desa Tuloa, salah satu desa di Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, menjadi contoh nyata wilayah yang masih memerlukan penguatan kapasitas dalam bidang tersebut. Berdasarkan data dari BPS Bone Bolango (2023), desa ini diklasifikasikan sebagai desa berkembang, artinya desa ini masih berada dalam tahap peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan layanan dasar. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 708 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 51,49 jiwa/km², menandakan karakter desa yang tidak terlalu padat namun cukup aktif dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas. Secara administratif, desa ini terdiri atas empat dusun dan seluruhnya telah memiliki status hukum definitif (BPS Bone Bolango, 2023).

Namun, dari sisi tata kelola pembangunan, desa ini menghadapi kendala yang cukup umum, yakni rendahnya kapasitas aparatur dalam menyusun RAB yang sesuai dengan standar harga satuan (misalnya SHSD dan AHSP), serta minimnya penguasaan terhadap perangkat lunak TIK sederhana seperti Microsoft Excel atau aplikasi sejenis yang sebenarnya dapat digunakan untuk membantu proses perhitungan dan dokumentasi teknis. Selama ini, penyusunan RAB di Tuloa umumnya dilakukan secara manual dan hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, tanpa proses analisis harga satuan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menimbulkan tantangan serius, terutama dalam menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Aparatur desa, khususnya Kepala Urusan Perencanaan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sangat membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan pendampingan langsung.

Padahal, seperti dijelaskan dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2023, penyusunan AHSP yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan konstruksi yang efisien dan berkualitas (Kemen PUPR, 2023). Secara teknis, penggunaan AHSP sebagai alat bantu dalam merinci biaya pekerjaan telah terbukti memberikan struktur penghitungan yang lebih akurat dan terukur, karena memperhitungkan tenaga kerja, bahan bangunan, serta peralatan secara spesifik sesuai kondisi lapangan (Nata, 2022). Penelitian Saryo et al. juga menegaskan bahwa perbandingan antara metode AHSP dan SNI menghasilkan estimasi anggaran yang lebih efisien dan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam perencanaan biaya (Endom et al., 2023).

Keterbatasan dalam penggunaan perangkat TIK juga menjadi penghambat efisiensi dan akuntabilitas. Studi Aisyaturrahmi et al. menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis sekalipun, desa yang memiliki dokumentasi digital dan sistem pelaporan berbasis aplikasi cenderung lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa (Aisyaturrahmi et al., 2021). Sementara itu, penguatan tata kelola desa melalui digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membentuk sistem kolaborasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat desa (Zulmasyhur et al., 2024).

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa merupakan prasyarat penting untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Studi Adib Alfarisi & Heriyanto (2024) menggarisbawahi bahwa pola hubungan kolaboratif yang tidak sistematis akan berdampak pada stagnasi program dan menurunkan efektivitas pembangunan partisipatif (Alfarisi & Heriyanto, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dokumen teknis seperti RAB juga harus membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih inklusif.

Dalam Permendagri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa dan staf desa lainnya dengan badan permusyawaratan desa melalui peraturan desa yang telah dibuat. Pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabel mengacu pada dimintai pertanggungjawaban secara hukum, sedangkan transparan dan partisipatif merujuk pada bagaimana sesuatu dikelola, termasuk lingkungan dalam proses. Selain itu, keuangan desa juga harus dicatat, dilaporkan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi keuangan pemerintah (Aisyaturrahmi et al., 2021; Oktavia, 2024).

Di sisi lain, pengelolaan keuangan desa yang lemah juga sangat berisiko terhadap kegagalan pembangunan dan potensi penyimpangan. Ginting et al. dalam jurnal Sustainability menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Desa sebagai strategi untuk mencegah kesalahan administratif dan meningkatkan akuntabilitas publik (Ginting et al., 2023; Ramadhanny et al., 2018).

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan RAB berbasis TIK di Desa Tuloa menjadi sangat relevan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga mendorong lahirnya budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Lebih jauh, pelatihan ini juga mendukung prioritas riset nasional dalam pengembangan ekonomi digital, serta mendukung pencapaian SDGs Goal 17, yaitu penguatan sarana pelaksanaan pembangunan melalui kemitraan dan transformasi digital tata kelola.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tuloa dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai mitra utama sekaligus pelaksana kegiatan secara langsung. Kegiatan ini difokuskan pada dua bidang utama: (1) tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan desa (administratif-teknis), serta (2) peningkatan literasi teknologi informasi (pendidikan-digital).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berikut adalah tahapan dan metode pelaksanaan solusi secara sistematis:

1.1 Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan dan Koordinasi Awal
 - Observasi lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil mitra dan menyepakati waktu pelaksanaan.
 - Koordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 - Penandatanganan komitmen pelaksanaan kegiatan antara tim pengabdian dan pemerintah desa.
- b. Pelaksanaan Solusi Bidang I: Tata Kelola Keuangan dan Perencanaan
 - Pelatihan Penyusunan RAB berdasarkan AHSP, SNI, dan SHSD.
 - Simulasi langsung penyusunan RAB untuk proyek desa (misal pembangunan talud atau drainase).
 - Pendampingan intensif dalam menyusun dokumen anggaran proyek desa menggunakan standar teknis.
 - Penyerahan template digital RAB dan modul pelatihan kepada aparatur desa.
- c. Pelaksanaan Solusi Bidang II: Literasi TIK dan Pengelolaan Arsip Digital
 - Pelatihan penggunaan Excel/Google Spreadsheet untuk perhitungan volume pekerjaan, harga satuan, dan rekapitulasi anggaran.
 - Pelatihan pengelolaan file digital, folderisasi, penamaan file, dan sistem pengarsipan online (Google Drive).
 - Praktik langsung pengisian format RAB digital oleh aparatur desa.
- d. Pelibatan Masyarakat dan Pemerintah Desa
 - Melibatkan perwakilan masyarakat non-perangkat untuk turut menyaksikan proses pelatihan sebagai bentuk edukasi publik dan peningkatan transparansi.
 - Diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menyerap masukan dari masyarakat terkait proyek prioritas dan partisipasi dalam pengawasan pembangunan.

1.2 Partisipasi Mitra

- a. Mitra Sasaran (Pemerintah Desa Tuloa):
 - Menyediakan tempat dan sarana pelaksanaan pelatihan (ruang balai desa, listrik, konsumsi sederhana).
 - Menyiapkan peserta dari unsur perangkat desa dan TPK.
 - Memberikan umpan balik dan usulan evaluasi selama dan setelah pelatihan.

- b. Mitra Pendukung (jika ada, seperti DPMD atau Kecamatan):
 - Dilibatkan sebagai narasumber tambahan untuk menjelaskan regulasi teknis yang berlaku.
 - Memberikan penguatan terhadap legitimasi hasil pelatihan agar bisa digunakan secara resmi oleh desa.

1.3 Penentuan Peserta Pelatihan

Penentuan peserta pelatihan dilakukan berdasarkan kriteria: (1) aparatur desa yang terlibat langsung dalam penyusunan RAB dan perencanaan pembangunan (Kaur Perencanaan, Bendahara, TPK), (2) memiliki kemampuan dasar komputer, dan (3) menunjukkan komitmen untuk menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pembangunan desa berikutnya.

1.4 Evaluasi Pelaksanaan

- a. Evaluasi dilakukan secara berlapis, dengan metode berikut:
 - Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi RAB dan penggunaan Excel.
 - Umpan balik langsung (kuisisioner) dari peserta mengenai efektivitas pelatihan dan kesiapan menerapkan hasilnya.
 - Evaluasi lapangan berupa penilaian terhadap dokumen RAB proyek yang dihasilkan sebagai luaran akhir kegiatan.
- b. Indikator evaluasi utama:
 - Jumlah aparatur yang mampu menyusun RAB sesuai standar.
 - Adanya dokumen RAB digital tersimpan rapi dan dapat digunakan untuk kegiatan nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Hasil Asesmen Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, diawali dengan proses asesmen kebutuhan masyarakat sebagai dasar perumusan program. Asesmen ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 71 responden dari total sekitar 720 jiwa penduduk, sehingga mewakili 9,8% dari populasi desa. Berdasarkan teori sampling dalam penelitian sosial, proporsi tersebut sudah cukup representatif untuk memperoleh gambaran umum kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan warga.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan isu utama yang paling dirasakan masyarakat. Sebagian besar warga menilai kondisi jalan lingkungan, saluran irigasi, dan fasilitas umum masih memerlukan perbaikan. Namun, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur tergolong tinggi, terutama karena masyarakat melihat pembangunan fisik sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan dan konektivitas ekonomi desa. Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen teknis perencanaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Temuan tersebut menguatkan relevansi program inti yang diusulkan, yakni “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan RAB sesuai Standar Harga Satuan dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa”. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan aktual desa melalui pelatihan teknis penyusunan RAB berbasis *Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)* dan *Standar Nasional Indonesia (SNI)*, serta pengenalan digitalisasi dokumen agar tata kelola keuangan desa lebih efisien dan akuntabel.

3.2. Pelaksanaan Program dan Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama dua hari pada bulan September 2025, bertempat di Balai Desa Tuloa. Peserta berjumlah 15 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Bendahara, anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta beberapa unsur masyarakat seperti Karang Taruna dan tenaga kesehatan desa. Pendekatan kegiatan bersifat partisipatif dan aplikatif, dengan mengedepankan metode *learning by doing* agar peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang diperoleh.



Gambar 1. Foto Pelatihan RAB berdasarkan AHSP dan SNI

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua tahapan utama, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Hari pertama difokuskan pada pelatihan penyusunan RAB berbasis AHSP/SNI, meliputi pengenalan struktur RAB, identifikasi jenis pekerjaan, perhitungan volume, serta analisis harga satuan berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat. Peserta juga diberi kesempatan melakukan simulasi penyusunan RAB secara manual untuk pekerjaan sederhana seperti rabat beton dan talud desa.

Hari kedua difokuskan pada penggunaan *microsoft excel* dalam penyusunan dan digitalisasi dokumen RAB. Peserta dilatih membuat format spreadsheet otomatis untuk menghitung total biaya pekerjaan berdasarkan volume dan harga satuan. Selain itu, diperkenalkan pula sistem penyimpanan dan pengarsipan digital menggunakan *google drive* sebagai upaya mendukung transparansi dan kemudahan akses dokumen keuangan desa. Pada sesi akhir, peserta menyusun satu dokumen RAB proyek fisik nyata berdasarkan RKPDes tahun berjalan sebagai bentuk penerapan langsung dari seluruh materi pelatihan.

3.3. Hasil Evaluasi Kegiatan

Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 15 peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari 55 pada pre-test menjadi 90 pada post-test, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 35%. Hasil ini menggambarkan bahwa kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan, terutama dalam hal:

1. Menyusun item pekerjaan dan volume sesuai AHSP/SNI.
2. Menggunakan rumus Excel untuk perhitungan biaya dan analisis harga satuan.
3. Mengelola serta menyimpan dokumen digital RAB secara sistematis.
4. Menyusun satu dokumen RAB lengkap untuk proyek pembangunan desa.

Secara kuantitatif, seluruh peserta (100%) mampu menginput data pekerjaan, volume, dan harga satuan dalam spreadsheet yang disiapkan. Selain itu, peserta mampu memodifikasi template RAB untuk kebutuhan proyek lain, yang menunjukkan tingkat pemahaman aplikatif terhadap materi pelatihan.

Dari sisi kualitatif, hasil pengamatan dan wawancara umpan balik menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan rasa percaya diri aparatur desa dalam melakukan perencanaan pembangunan. Sebanyak 80% peserta menyatakan pelatihan sangat relevan dengan tugas mereka, dan 70% berkomitmen menerapkan hasil pelatihan dalam penyusunan RAB tahun berikutnya. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelum pelatihan, mereka sering hanya menyalin RAB dari tahun sebelumnya tanpa perhitungan rinci. Nilai Pre-Test dan Post-Test dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan

Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Peningkatan (%)	Keterangan
1	58	90	32	Meningkat signifikan
2	52	88	36	Meningkat signifikan
3	55	90	35	Meningkat signifikan
4	54	88	34	Meningkat signifikan
5	57	91	34	Meningkat signifikan
6	53	89	36	Meningkat signifikan

Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Peningkatan (%)	Keterangan
7	56	91	35	Meningkat signifikan
8	55	89	34	Meningkat signifikan
9	52	86	34	Meningkat signifikan
10	56	92	36	Meningkat signifikan
11	54	88	34	Meningkat signifikan
12	57	91	34	Meningkat signifikan
13	55	90	35	Meningkat signifikan
14	58	93	35	Meningkat signifikan
15	54	89	35	Meningkat signifikan
Rata-rata	55	90	35%	Efektivitas pelatihan tinggi

Setelah pelatihan, mereka memahami pentingnya mengacu pada standar AHSP/SNI agar perhitungan biaya lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Desa Tuloa juga mulai mengadopsi sistem pengarsipan digital melalui *google drive* untuk menyimpan dokumen RAB dan laporan keuangan, yang menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan dalam mendorong digitalisasi tata kelola desa.

3.4. Pembahasan dan Dampak Keberlanjutan

Kegiatan pengabdian ini memberikan beberapa temuan penting. Pertama, peningkatan kapasitas teknis aparatur desa menjadi faktor kunci dalam memperbaiki tata kelola pembangunan di tingkat desa. Kemampuan menyusun RAB secara benar dan berbasis standar teknis memungkinkan pemerintah desa merencanakan anggaran secara lebih realistis, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan (Kania Sugiharti et al., 2023) bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi desa. Melalui penggunaan spreadsheet dan pengarsipan berbasis cloud, proses dokumentasi menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan aman dari risiko kehilangan data. Transformasi ini mendukung prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Ketiga, kegiatan ini berdampak terhadap penguatan kemandirian desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Desa Tuloa kerap bergantung pada pihak luar atau tenaga teknis kabupaten untuk penyusunan dokumen RAB. Setelah pelatihan, aparatur desa telah mampu menyusun RAB sendiri untuk proyek-proyek kecil hingga menengah. Kemampuan ini akan mendukung efektivitas implementasi RKPDes serta mempercepat proses pembangunan fisik di desa.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, program ini juga berhasil menumbuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Pelibatan unsur non-aparatur seperti Karang Taruna dan kader desa dalam pelatihan memberikan efek multiplikatif terhadap penyebaran pengetahuan teknis di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga memiliki dimensi sosial berupa penguatan kapasitas kolektif desa.

Dalam konteks keberlanjutan, Pemerintah Desa Tuloa berkomitmen untuk meneruskan kegiatan pendampingan melalui pembentukan Tim Teknis Desa yang bertugas mengawal penyusunan RAB setiap kegiatan fisik. Selain itu, hasil pelatihan akan diintegrasikan dengan sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi seperti Siskeudes, sehingga seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat terekam secara digital dan terstandar.

3.5. Implikasi terhadap Penguatan Tata Kelola Desa

Dari keseluruhan proses dan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan RAB tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan *capacity building* berbasis praktik langsung efektif diterapkan di tingkat desa, khususnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang menuntut akurasi dan keterbukaan.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan transformasi digital dan penguatan tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Dengan kemampuan aparatur menyusun dan mengelola RAB berbasis digital, Desa Tuloa diharapkan mampu menjadi contoh penerapan inovasi tata kelola keuangan yang efisien dan sesuai standar.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menghasilkan dua capaian utama: (1) peningkatan kapasitas teknis dan digital aparatur desa sebesar 35% berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif, serta (2) terbentuknya budaya kerja baru yang lebih transparan dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Kedua capaian ini menjadi pondasi penting bagi terciptanya kemandirian desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan berbasis data.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas aparatur desa dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan dan keterampilan peserta sebesar 35%, yang tercermin dari kemampuan mereka dalam menyusun RAB berbasis Excel, memahami prinsip perhitungan biaya yang akurat, serta mengelola dokumen secara digital dan sistematis. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung, simulasi dokumen, dan digitalisasi merupakan metode yang efektif dalam membangun kompetensi teknis aparatur desa, terutama dalam konteks pengelolaan dana pembangunan infrastruktur yang menuntut akurasi dan transparansi. Kelebihan utama kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif dan aplikatif yang melibatkan langsung aparatur dan unsur masyarakat desa, sehingga hasil pelatihan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam penyusunan dokumen proyek fisik desa. Selain itu, pengenalan penggunaan teknologi digital melalui Microsoft Excel dan sistem pengarsipan berbasis cloud (Google Drive) menjadi inovasi yang relevan dengan tuntutan era digitalisasi pemerintahan desa. Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan dalam hal waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan keterbatasan sarana komputer di tingkat desa, sehingga belum seluruh peserta dapat berlatih secara optimal dengan perangkat masing-masing. Ke depan, pengembangan kapasitas aparatur desa perlu diarahkan melalui langkah-langkah konkret sebagai berikut: 1). Pembentukan Tim Teknis Desa yang memiliki tugas khusus dalam perencanaan dan penganggaran berbasis data, dengan pendampingan berkala dari perguruan tinggi; 2). Penyusunan modul lanjutan pelatihan RAB digital, mencakup integrasi langsung dengan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes dan SIPD Desa, agar hasil pelatihan dapat terhubung dengan sistem resmi pemerintah; 3). Peningkatan infrastruktur digital desa, misalnya penyediaan perangkat komputer/laptop minimal satu unit per perangkat desa dan peningkatan konektivitas internet di kantor desa; 4). Program pelatihan berjenjang yang melibatkan aparatur baru setiap tahun untuk menjaga keberlanjutan dan regenerasi kompetensi teknis; 5). Kerja sama lintas lembaga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta kecamatan untuk mengadopsi model pelatihan ini sebagai standar peningkatan kapasitas aparatur di desa-desa lain. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Desa Tuloa berpotensi menjadi model penerapan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi desa lain dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa berbasis digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini melalui dana hibah PNPB tahun 2025 dengan nomor kontrak 1436/UN47.D1/HK.07.00/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyaturrahmi, A., Nuswantara, D. A., Prastiwi, D., Bhilawa, L., & Md Daud, S. A. M. (2021). Transparency and Accountability of a Village Fund Management During COVID-19 Crisis.

- International Journal of Service Management and Sustainability*, 6(2), 189–210. <https://doi.org/10.24191/ijsms.v6i2.15580>
- Alfarisi, M. A., & Heriyanto. (2024). The Relationship between Village Government and Community in Village Development in Mungguk Bantok, Indonesia. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 911–928. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.201>
- BPS Bone Bolango. (2023). *Kecamatan Bulango Utara dalam Angka (Bulango Utara Subdistrict In Figures)*. BPS Kab. Bone Bolango.
- Endom, S. T., Saleh, L. M., & Titaley, H. D. (2023). Rencana Anggaran Biaya Menggunakan Metode AHSP 2016 dan SNI 2018 pada Proyek Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kabupaten Maluku Tengah. *JOURNAL AGREGATE*, 2(2), 255–261.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village Government's Risk Management and Village Fund Administration in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(24). <https://doi.org/10.3390/su152416706>
- Kania Sugiharti, D., Herdita Ramadhani, R., Sueb, M., Irawadi, C., & Yuliafitri, I. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12(2), 255–261.
- Kemen PUPR. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*. www.peraturan.go.id
- Nata, A. (2022, June 7). *Analisa Harga Satuan Pekerjaan AHSP SNI*. BETANTT. <https://betantt.com/ebook-analisa-harga-satuan-pekerjaan-gratis/>
- Oktavia, S. (2024). Transparent Governance: Unveiling Accountability in Village Budget Management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1036>
- Ramadhanny, R. K., Yuwono, T., & Manar, D. G. (2018). Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) untuk Menciptakan Good Governance di Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), 1–15.
- Zulmasyhur, Dian Setiawan, H., & Petrus W, N. L. (2024). Peningkatan Tata Kelola Melalui Transformasi Digital (Enhancing Governance Through Digital Transformation). *Jurnal Governansi*, 10(1), 127–136.